



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA

SINERGI PELAYANAN PRIMA DAN PENGUATAN GARDA KEIMIGRASIAN

BULETIN EDISI XXIV



PERKUAT KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA GELAR RAPAT PERSIAPAN PEKPPP TAHUN 2026



"Pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan komitmen bersama, kolaborasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap layanan yang diberikan mampu memenuhi harapan masyarakat."

KENDARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra) menggelar rapat dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara pada Senin, 22 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026.

Rapat tersebut diikuti oleh jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra bersama tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi di wilayah Sulawesi Tenggara yang secara aktif menyatakan kesiapan dalam mengikuti rangkaian kegiatan PEKPPP Tahun 2026. Melalui kegiatan ini, dilakukan pembahasan terkait kesiapan dokumen, pemenuhan indikator penilaian, serta strategi peningkatan kualitas layanan publik agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rapat ini menjadi langkah strategis Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dalam memperkuat sinergi antar satuan kerja serta memastikan penyelenggaraan pelayanan keimigrasian berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya persiapan yang matang, diharapkan seluruh UPT Imigrasi di wilayah Sulawesi Tenggara mampu memberikan pelayanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

PASTIKAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN SESUAI PROSEDUR, KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA KOORDINASI TERKAIT DETENSI DAN DEPORTASI



KENDARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Senin (22/06). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan setiap langkah dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) yang berlaku.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara. Melalui komunikasi dan pembahasan bersama unit teknis terkait, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra memastikan proses pendetensian maupun pendeportasian dilakukan secara tepat, terukur, serta tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum dan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Menyelaraskan Proses Penindakan Administratif Keimigrasian

Dalam kegiatan koordinasi ini, dilakukan pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian, mulai dari tahapan pendetensian hingga proses pendeportasian terhadap orang asing. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh prosedur yang diterapkan oleh jajaran di wilayah telah sesuai dengan regulasi serta standar operasional yang telah ditetapkan.



Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menjadi langkah penting dalam menjaga keseragaman pelaksanaan tugas, khususnya dalam menghadapi berbagai dinamika permasalahan keimigrasian di lapangan. Dengan adanya penyamaan pemahaman, diharapkan setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.



Perkuat Profesionalisme dalam Pengawasan dan Penindakan

Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dalam memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang profesional, transparan, dan berintegritas. Melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara diharapkan semakin efektif serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



MENJAGA GERBANG SULTRA: LANGKAH PROAKTIF KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA HARMONISKAN DISIPLIN INTERNAL DAN PENGAWASAN LAPANGAN DI BAUBAU

"Pelayanan publik yang tepercaya lahir dari rahim institusi yang disiplin. Ketika internal kita kuat, maka pengawasan di lapangan pun akan berjalan objektif dan berwibawa."



BAUBAU – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan wilayah dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Selama empat hari penuh, terhitung sejak tanggal 22 hingga 25 Juni 2026, tim gabungan dari Kanwil Sultra menerjunkan personelnya ke Kota Baubau. Agenda besarnya adalah menggelar monitoring menyeluruh yang mencakup penegakan kode etik pegawai serta pengawasan keimigrasian secara on-the-spot.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Sebagai salah satu hub ekonomi dan pariwisata yang strategis di Pulau Buton, Kota Baubau menjadi magnet yang menarik mobilitas, baik bagi warga lokal maupun warga negara asing (WNA). Oleh karena itu, pengawasan yang terintegrasi menjadi harga mati.

Memperkuat "Rumah Sendiri" Melalui Penegakan Kode Etik

Perjalanan tim diawali dengan menyambangi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau. Di sini, fokus utama tim adalah melakukan audit internal dan pembinaan terkait penerapan kode etik kedinasan. Pengawasan internal ini menyorot aspek-aspek krusial seperti tingkat kedisiplinan kerja, profesionalisme dalam pelayanan, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).



Monitoring ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan instrumen penting untuk merawat iklim good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Melalui ruang diskusi dan evaluasi yang dibuka selama monitoring, jajaran petugas Imigrasi Baubau diingatkan kembali mengenai peran mereka sebagai abdi negara yang berintegritas tinggi, bebas dari pungutan liar, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menyisir Sektor Publik, Memastikan Kepatuhan Administrasi WNA

Setelah memastikan "dapur" internal berjalan sesuai rel, Tim Kanwil Imigrasi Sultra langsung bergerak melebarkan sayap pengawasan ke sektor publik. Target operasi kali ini difokuskan pada titik-titik krusial yang kerap menjadi perlintasan atau tempat tinggal WNA, yaitu sektor akomodasi (perhotelan/penginapan) dan sektor pendidikan.

Petugas melakukan pemeriksaan dokumen administrasi keimigrasian secara humanis namun tetap teliti. Dari beberapa sampel penginapan dan institusi pendidikan yang dikunjungi, tim memberikan apresiasi besar karena tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Baik dokumen tinggal, visa, maupun aktivitas para WNA yang berada di Baubau terpantau tertib dan sesuai dengan peruntukannya.



MENJAGA INTEGRITAS DAN KEDAULATAN WILAYAH: KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA PERKUAT DISIPLIN INTERNAL DAN OPERASI INTELJEN DI WAKATOBI

WAKATOBI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian. Selama empat hari, terhitung sejak tanggal 23 hingga 26 Juni 2026, tim Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra melaksanakan rangkaian kegiatan di Kabupaten Wakatobi yang meliputi pelaksanaan Majelis Kode Etik Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi serta Operasi Intelijen Keimigrasian di wilayah Kabupaten Wakatobi.

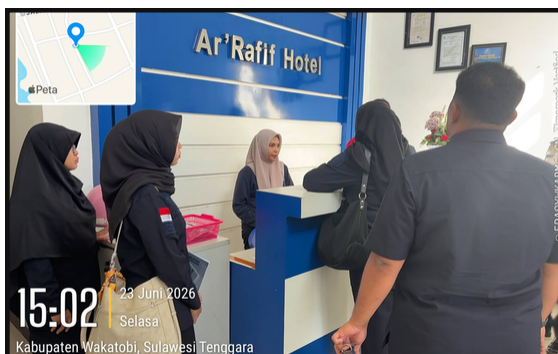
Kegiatan ini merupakan bentuk langkah strategis dalam memastikan seluruh jajaran Imigrasi menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja keimigrasian.



Meneguhkan Profesionalisme Melalui Majelis Kode Etik Keimigrasian

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan Majelis Kode Etik Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi. Kegiatan tersebut menjadi wadah pemeriksaan, klarifikasi, serta evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai etika dan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan. Pelaksanaan majelis kode etik ini tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan untuk menciptakan aparaturnya Imigrasi yang berintegritas, bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui proses yang objektif dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang menjunjung tinggi disiplin, kepatuhan, serta nilai-nilai dasar ASN. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola organisasi dan mewujudkan institusi Imigrasi yang profesional, berintegritas, serta terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Memperkuat Integritas Internal dan Mengoptimalkan Pengawasan Keimigrasian

Melalui Operasi Intelijen Keimigrasian, Tim Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra melakukan pengawasan, pemantauan, serta pengumpulan informasi di beberapa hotel dan lokasi yang menjadi titik aktivitas orang asing di Kabupaten Wakatobi guna mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian dan memastikan keberadaan serta aktivitas orang asing di Kabupaten Wakatobi tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dalam menghadirkan pelayanan publik yang terpercaya sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

sinergi pelayanan prima, 3 KANTOR IMIGRASI DI SULTRA SIAP BERKOMPETISI DALAM EVALUASI PEKPPP 2026

KENDARI – Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik keimigrasian di Sulawesi Tenggara terus dipacu. Pada Rabu (24/06), sebanyak 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi di wilayah Sulawesi Tenggara secara aktif siap untuk mengikuti kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.

Dalam suksesi evaluasi nasional ini, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sultra mengambil peran krusial sebagai pengawas dan pendamping. Kehadiran jajaran Kanwil memastikan bahwa proses evaluasi yang akan di lalui oleh ketiga UPT berjalan dengan lancar, obyektif, serta sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku.

Kegiatan PEKPPP merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan untuk mengukur, memantau, dan mendorong unit kerja pelayanan agar konsisten meningkatkan mutu pelayanan langsung kepada masyarakat.



KOMITMEN PEMBENAHAN BERKELANJUTAN

Meskipun tidak bertindak sebagai objek pengujian, keterlibatan aktif Kanwil sebagai pengawas mencerminkan komitmen kuat institusi dalam mengawal pembenahan berkelanjutan (*continuous improvement*) pada seluruh satker di bawah naungannya.

Melalui output evaluasi PEKPPP 2026 ini, dengan pengawasan dan pembinaan intensif dari Kanwil, ketiga UPT Kantor Imigrasi di Sulawesi Tenggara optimis dapat terus melahirkan inovasi pelayanan. Langkah ini diambil demi memastikan layanan keimigrasian di Bumi Anoa semakin optimal, transparan, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

UJI STANDAR PELAYANAN DI TINGKAT UPT

Sebagai garda terdepan pelayanan keimigrasian, ketiga UPT Kantor Imigrasi di Sultra dinilai secara komprehensif berdasarkan berbagai indikator utama. Hal ini meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, kualitas sarana prasarana, optimalisasi sistem informasi, hingga efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

Melalui pengawasan dan pembinaan melekat dari Kanwil, keikutsertaan 3 UPT ini menjadi tolok ukur nyata untuk melihat sejauh mana standar pelayanan publik telah diimplementasikan secara efektif dan merata di lapangan.



DORONG EFEKTIVITAS LAYANAN KEIMIGRASIAN, KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA IKUTI SOSIALISASI PENYEDERHANAAN REGULASI DAN QUICK WIN

KENDARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara (Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra) mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyederhanaan Regulasi dan Surat Edaran Quick Win Penguatan Penyelenggaraan Fungsi Keimigrasian yang diselenggarakan oleh Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian melalui Zoom Meeting pada Kamis (25/06). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah penyelarasan kebijakan serta penguatan pemahaman jajaran Imigrasi terhadap regulasi terbaru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.



Penyelarasan Kebijakan untuk Pelayanan yang Lebih Responsif

Perubahan dan penyederhanaan regulasi menjadi bagian dari transformasi penyelenggaraan layanan keimigrasian agar lebih mudah dipahami, efektif, serta memberikan kepastian dalam pelaksanaannya. Melalui sosialisasi ini, jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan, khususnya dalam pelayanan izin tinggal dan penetapan status keimigrasian.

Pemahaman yang selaras antar jajaran menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan adanya penyampaian kebijakan secara langsung dari unit teknis terkait, diharapkan setiap petugas mampu menerapkan regulasi secara tepat, profesional, dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.



Perkuat Fungsi Keimigrasian Melalui Adaptasi Regulasi

Keikutsertaan Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap langkah strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan fungsi keimigrasian. Adaptasi terhadap regulasi yang lebih sederhana dan efektif menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas.

Melalui penguatan pemahaman dan koordinasi yang berkelanjutan, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme jajaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan layanan keimigrasian yang cepat, tepat, transparan, dan berintegritas.



EDUKASI KEIMIGRASIAN DAN CEGAH TPPO, 6 DESA BINAAN IMIGRASI DIBENTUK DI KABUPATEN KOLAKA

KOLAKA – Langkah strategis dalam memperluas edukasi serta memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat kembali ditunjukkan oleh jajaran Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara. Pada Kamis (25/06), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari resmi melaksanakan kegiatan pembentukan Desa Binaan Imigrasi yang berpusat di Kabupaten Kolaka.

Melalui agenda ini, sebanyak 6 (enam) Desa Binaan Imigrasi resmi dibentuk. Guna memastikan program berjalan optimal dan berkelanjutan, Imigrasi Kendari juga menunjuk 2 (dua) orang Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang akan bertugas memberikan pembinaan serta pendampingan keimigrasian secara langsung kepada masyarakat di wilayah binaan tersebut.

SINERGI HINGGA TINGKAT DESA

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari atas inisiatif nyata ini. Apresiasi juga dialamatkan kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berkomitmen menyukkseskan pembentukan desa binaan ini.

“Pembentukan Desa Binaan Imigrasi merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan pengawasan keimigrasian yang lebih dekat dengan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi hingga tingkat desa,” ujar Ganda Samosir.



MEMBANGUN MASYARAKAT SADAR HUKUM

Hadirnya Desa Binaan Imigrasi dan petugas PIMPASA di tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan dini dalam mencegah berbagai pelanggaran hukum keimigrasian, termasuk bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Lewat edukasi berkala, masyarakat diharapkan semakin memahami ketentuan keimigrasian yang legal. Lebih dari itu, warga desa kini didorong untuk mampu menjadi mitra strategis Imigrasi dalam mendukung terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan sadar hukum di Bumi Anoa.

